

Implementation of the Smart Indonesia Program Policy at SMP Negeri 3 Krian , Sidoarjo Regency

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo

Irdani Hermawan¹⁾, Lailul Mursyidah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) policy at SMP Negeri 3 Krian, Sidoarjo City. This research uses a qualitative descriptive research form. The method used is a qualitative method. Data collection methods are carried out by reviewing legislation, interviews, observations. The data analysis method uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. In this study, in determining informants using the Purposive Sampling technique, informants were randomly determined according to the relevant information. The Smart Indonesia Program (PIP) is one of the government's policies in an effort to equalize education. The purpose of this PIP is to help with the school fees of underprivileged students from elementary school (SD) to high school (SMA). The results of this research show that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) Policy at SMP Negeri 3 Krian, Sidoarjo City is still not optimal in its implementation. Where there are still several problems, including: Socialization regarding PIP is still lacking, Use of PIP funds is inappropriate, Difficulty collecting evidence of use of PIP funds.*

Keywords - *Policy Implementation; Smart Indonesian Program; Krian 3 Public Middle School*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meninjau perundang-undangan, wawancara, observasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, informan ditentukan secara acak sesuai dengan yang terkait. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo masih belum maksimal dalam penerapannya. Dimana masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya : Sosialisasi terkait PIP masih kurang, Penggunaan Dana PIP kurang tepat, Kesulitan mengumpulkan bukti penggunaan dana PIP.*

Kata Kunci - *Implementasi Kebijakan; Program Indonesia Pintar (PIP); SMP Negeri 3 Krian*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses mempelajari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan di negara ini. Peningkatan kualitas hidup manusia dimulai dari

pendidikan. Walaupun pendidikan sangat penting, tidak semua masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan. Permasalahan ini dikarenakan terkendala oleh biaya pendidikan yang tinggi[1]. Sehingga masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mengenyam pendidikan. Faktor utama yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi adalah faktor ekonomi. Berdasarkan laporan tahunan UNICEF Indonesia tahun 2015, tingkat anak putus sekolah di bawah 18 tahun sekitar 4,7 juta. Sementara, laporan UNESCO dalam Education for All Global Monitoring Report, indeks pembangunan pendidikan Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 57 dari 115 negara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah yaitu dengan

memberikan bantuan untuk menunjang pendidikannya. Beasiswa merupakan salah satu alternatif untuk siswa yang mempunyai keinginan untuk sekolah dan dapat memenuhi kebutuhan sekolah[2].

Pembangunan pendidikan sangat penting untuk menunjang kemajuan negara karena pendidikan memegang peranan penting dalam pencapaian segala aspek kehidupan seperti keuangan, kualitas sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengakui hak asasi setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang diskriminasi sosial, ekonomi, etnis, agama, budaya atau gender, untuk mendapatkan pendidikan yang baik berdasarkan minat dan keterampilannya. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bernegara. Selain itu, dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dengan negara bertindak sebagai penyelenggara pendidikan nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yang sampai saat ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan pendidikan Indonesia. Menurut Bab 5, Bab 4, Undang-Undang Pendidikan Indonesia No. 20 Tahun 2003, semua warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Salah satu hal yang tidak mendorong pendidikan adalah masalah kemiskinan yang membuat masyarakat tidak memiliki pendidikan[3].

Indonesia adalah negara dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak seperti beberapa negara lain, bahkan negara-negara ASEAN. Demikian pula, Indonesia berada di peringkat rendah dalam hal kualitas sumber daya manusia. Ketidakberuntungan dan akses terhadap pendidikan dan akibat dari kemiskinan. Solusi untuk masalah pendidikan di Indonesia adalah dengan memperluas pemerataan, meningkatkan pendanaan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah dan mengurangi kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan pendidikan adalah kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan berpendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pendidikan yang wajib diberikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) atau keluarga yang kondisinya ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. PIP dilaksanakan sebagai program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. PIP telah menjadi bagian dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir tahun 2014. Ada banyak masalah di seluruh Indonesia dalam PIP ini. Ada banyak masalah seperti siswa yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan siswa yang bukan berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Septiandika, 2017). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Rohaeni & Saryono, 2018) bahwa kebijakan PIP melalui KIP yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah wewenang Kementerian dan Kebudayaan bertujuan untuk menyediakan bantuan terkhusus untuk siswa miskin sehingga dapat melanjutkan sekolahnya, dengan demikian sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mencegah anak putus sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan peran setiap sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan PIP melalui KIP secara operasional dengan baik agar PIP ini tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, dalam hal ini masih banyak peserta didik yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya pendidikan sekolah[4].

Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan. Namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai[5]. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat

membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak[6].

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena siswa-siswa tersebut yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan tidak adalagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurang biaya. Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama[7].

Sebagaimana observasi dilapangan SMP Negeri 3 Krian bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, terdapat banyak kesulitan dalam mencapai tujuannya. Hubungan antara PIP yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana PIP, dan sulitnya mendapatkan bukti penggunaan dana PIP tidak dapat dipisahkan. Konsep program Indonesia Pintar KIP sudah sangat jelas, termasuk target penerima yang sesuai dengan sasaran yang memperoleh PIP. Berikut adalah Perbandingan pada jumlah penerima dan jumlah dana PIP di SMP Negeri 3 Krian pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Penerima PIP di SMP Negeri 3 Krian Pada tahun 2020-2022

<i>No</i>	<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penerima</i>	<i>Jumlah Dana</i>
1	2020	127	190.500.000
2	2021	60	90.000.000
3	2022	8	12.000.000

Sumber : Diolah dari SMP Negeri 3 Krian (2023)

Dari tabel diatas, penyaluran dana PIP di SMP Negeri 3 Krian mengalami pengurangan data jumlah penerima PIP dari tahun 2020 hingga 2022, dimana pada tahun 2020 jumlah penerima dana PIP tahap 1 dan 2 berjumlah 127 siswa, pada tahun 2021 berjumlah 60 siswa, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 8 siswa. Hal ini disebabkan dari beberapa permasalahan. Dimana pembagian PIP sering terjadi kesalahpahaman antar orang tua murid. Sering tidak adanya bukti penggunaan dana PIP, dan sosialisasi terkait dana PIP kurang jelas bagi para siswa, serta penilaian siswa yang menurun yang menyebabkan pemberian dana PIP lebih mempertimbangkan kembali dengan memberikan sesuai kriteria PIP.

Dalam Implementasi kebijakan beasiswa PIP pada SMP Negeri 3 Krian, terdapat beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam menganalisis, antara lain : Yang pertama adalah Penelitian dari Rizky Adyatma yang berjudul “Implementasi Kebijakan PIP di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)” Penelitian ini memakai penelitian jenis kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Beasiswa atau PIP. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan PIP di

SDN Gogik 1 ditinjau dari 5 faktor, diantaranya : Jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan tingkat kepatuhan dari pelaksana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan fokus penelitian juga sama menggunakan Implementasi Kebijakan PIP. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Dimana penelitian ini ada di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sebelumnya di SDN Groggi 1 Semarang. Kemudian yang kedua adalah Penelitian dari Muhamad Fiqih dkk yang berjudul "Implementasi Kebijakan PIP pada jenjang sekolah dasar". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan PIP, dengan Teknik pengumpulan data antara lain wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal ini sekolah

mengikuti prosedur yang dirancang untuk siswa sudah dapat, tetapi masih belum berjalan dengan lancar, karena yang mendapatkan program Indonesia Pintar masih belum sesuai dengan target penerima bantuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian yang sama menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian juga sama yaitu Implementasi Kebijakan PIP. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah studi kasus. Dimana penelitian sebelumnya studi kasus di jenjang sekolah dasar, sedangkan penelitian ini di sekolah menengah pertama (SMP). Dan yang terakhir penelitian dari Hartini Retnaningsih yang berjudul "Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)". Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP di kota Kupang dan Palembang kurang baik karena adanya pengaruh elit dalam masyarakat dari daftar siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Pedoman yang disarankan adalah: 1) penilaian yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) pengaturan yang jelas agar PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang tidak lagi dipengaruhi oleh para politisi; 4) Mengembangkan mekanisme untuk mengontrol penggunaan bantuan PIP. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada persamaan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sama. Persamaan selanjutnya adalah fokus penelitian juga sama yaitu Implementasi kebijakan PIP. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP 3 Negeri Krian Kabupaten Sidoarjo, sedang penelitian ini mengambil di lokasi Kota Kupang yang terkait dengan jaminan sosial bidang Pendidikan dengan keterkaitan penerapan kebijakan PIP.

Berdasarkan Observasi dilapangan terdapat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar diantaranya Pertama, pencairan dana tidak sesuai jadwal. Kedua, banyak dana beasiswa PIP dilapangan digunakan diluar kebutuhan sekolah oleh orang tuanya. Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo masih memiliki beberapa permasalahan antara lain dalam penerapannya masih belum dikatakan optimal, dengan dipaparkan sesuai dengan Teori Edward III (Edward, 1980) memiliki empat indikator termasuk: Komunikasi, Layanan, Kebijakan Privasi dan Institusi, dan banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan penerima PIP antara tahun 2020-2022.

Dari segi etimologi, definisi penggunaan menurut Webster's Dictionary oleh Sorichin Abdul Wahab (Solichin, 2004), penggunaan berasal dari bahasa Inggris *used*. *To use* dalam kamus Merriam-Webster berarti memberi makna pada penggunaan dan memberi hasil yang baik. Tindakan berasal dari kata bahasa Inggris *to use*, yang berarti menggunakan. *To use* berarti melakukan sesuatu yang mempengaruhi atau berdampak pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan di dalam negara yang memiliki efek atau pengaruh yang dapat berwujud dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Di luar definisi praktik, kebijakan publik menurut Thomas R Dye: "Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Dengan kata lain, tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat[8].

II. METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menurut Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, dan rancangan penelitiannya bersifat sementara serta hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian[9]. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar. Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, data primer pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan PIP di SMP Negeri 3 Krian dengan menganalisa dilapangan. Data sekunder pada penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu dan undangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, menurut (Sugiono, 2015) teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara PIP, dan siswa penerima PIP yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerima Program Indonesia Pintar pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 per tahun agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah atau putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya Pendidikan.(Saryono, 2018).

Secara Teori, terkait Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo berdasarkan teori Edward III yang ada empat indikator, antara lain : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, dapat dipaparkan sebagai berikut[10] :

Komunikasi

Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi, yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten penyampaian informasi itu. Dalam penjabaran 3 dimensi tersebut adalah transmisi, dengan sosialisasi terkait kebijakan Program Indonesia Pintar yang sudah di umumkan pada akhir tahun 2014, kedua kejelasan informasi dimana sudah terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di berbagai sekolah, salah satunya sosialisasi di SMP Negeri 3 Krian dan ini jelas dan tepat, dan yang terakhir konsistensi penyampaian informasi sudah konsisten di sampaikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dalam Undang-undang dengan menyebarkan luaskan informasi tersebut dilingkungan pendidikan, salah satunya juga SMP Negeri 3 Krian.

Sedangkan Pengertian lain Komunikasi menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut

Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat di berbagai sekolah, salah satunya SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sosialisasi dalam pemahaman detail dan jelas terkait PIP bagi penerima di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo ini masih kurang begitu paham atau kurang mengerti. Sehingga sering terjadi syarat atau kriteria sebagai penerima

dengan data yang kurang lengkap. Sehingga sosialisasi SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo dengan siswa-siswi dan wali murid masih kurang maksimal dalam penyampaiannya. Berikut adalah sosialisasi pada saat Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) disampaikan kepada wali murid dan murid yang menerima dana PIP dan dihadiri para Guru yang terkait dan juga Kepala Sekolah serta Kepala PIP, antara lain :

Gambar 1



Pada gambar 1 terlihat Bapak/Ibu wali murid SMP Negeri 3 Krian menghadiri undangan sosialisasi Program Indonesia Pintar yang sudah ditentukan dan dipilih siapa saja yang mendapatkan bantuan dana tersebut, dengan mengundang siswa-siswi beserta wali murid yang terkait untuk mendengarkan penjelasan terkait Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Krian. Sosialisasi PIP dibagi menjadi 2 sesi dalam kurun waktu 1 bulan, agar sosialisasi PIP tidak berkerumun dan adanya pembatasan.

Gambar 2



Pada gambar 2 diatas adalah sesi ke 2 dalam pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Program PIP yang dihadiri oleh wali murid serta siswa-siswi yang terpilih sebagai penerima dana PIP. Dalam acara sosialisasi PIP dihadiri oleh Kepala Sekolah, Ketua PIP, serta pengurus lainnya. Dalam sosialisasi ini ada salah satu wali murid yang bertanya “Bagaimana jika dana tersebut dibelikan perlengkapan sekolah di luar sekolah, seperti alat olahraga atau baju

olahraga. Karena itu kan tidak terlalu dibutuhkan, tetapi anak ingin membeli barang tersebut, apakah diperbolehkan?”. Untuk pertanyaan salah satu murid diatas, dijawab langsung oleh Bendahara PIP yaitu Ibu Dian “Untuk pembelian alat olahraga tersebut juga termasuk perlengkapan sekolah, jadi boleh bu. Akan tetapi lebih membeli hal yang paling penting terlebih dahulu seperti seragam, tas, atau buku”. Dalam sosialisasi kedua ini berjalan dengan baik dalam menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait Program Indonesia Pintar. Agar orang tua juga mengetahui dan murid juga menggunakan dana tersebut sesuai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Contohnya pembelian buku, pembayaran seragam sekolah, dan sebagainya.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31–32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam hal ini Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yaitu (1) Sumber Daya Manusia dan (2) Sumber Daya Finansial[11].

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Secara kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP 3 Negeri Krian Kota Sidoarjo Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2020-2022 bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria karena sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi Dinas Pendidikan hanya bertugas untuk menyalurkan dana dan memverifikasi data siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)[12]. Sedangkan pihak pelaksana disekolah memiliki kepala sekolah dan operator sekolah untuk terlibat langsung dengan data-data calon penerima di sekolah.

Sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat sebetulnya sudah sangat mencukupi dimana pada Kabupaten Sidoarjo sendiri menerima dana disetiap tahunnya mengalami perbedaan disetiap pencairannya yang bisa dilihat pada website Kemendikbud Program Indonesia Pintar yang tertera berbagai informasi terkait Program Indonesia Pintar dalam pendanaannya, salah satunya di SMP Negeri 3 Krian Kecamatan Krian. Dimana dalam penerapan pencairan masih terbilang belum maksimal 100% terlaksana dikarenakan beberapa permasalahan, salah satunya pada saat pandemi Covid 19 yang menyebabkan program tidak berjalan dengan baik begitupun terkait pendanaan yang menurun. Sehingga masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat bantuan Program Indonesia Pintar. Berikut adalah data perbandingan jumlah dana yang diterima dan dicairkan pada tahun 2020-2022 pada tingkat SMP di Kecamatan Krian :

Tabel 2. Perbandingan jumlah dana diterima dan disalurkan pada tingkat SMP di Kecamatan Krian Tahun 2020-2022

<i>TAHUN</i>	<i>DANA DITERIMA</i>	<i>DANA DISALURKAN/DICAIRKAN</i>
2020	242.625.000	242.625.000
2021	248.625.000	248.625.000
2022	298.125.000	298.125.000

Sumber : Diolah dari SMP Negeri 3 Krian 2023

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa disetiap tahun dana PIP yang diterima dan disalurkan di seluruh Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kecamatan Krian mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2020 dana yang diterima senilai 242.625.000 sedangkan dana tersebut disalurkan dengan nilai yang sama. Selanjutnya pada tahun 2021 dengan dana yang diterima senilai 248.625.000 kemudian disalurkan dengan jumlah yang sama juga. Dan yang terakhir pada tahun 2022, dimana dana yang disalurkan 298.125.000 dan jumlah dana yang diterima juga sama, Dari ini dapat disimpulkan jumlah dana yang diterima sudah sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan kepada para siswa. Akan tetapi masih banyak para siswa yang belum menerima karena disebabkan berbagai hal, salah satunya

sudah diberhentikan dari penerimaan PIP karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan juga karena beberapa alasan tertentu yang menjadi pertimbangan penanggung jawab PIP. Pada tabel diatas disosialisasikan

kepada seluru wali murid dan murid pada saat pembagian dana PIP. Pada saat sosialisasi ada pertanyaan langsung dari salah satu wali murid kelas 4 “*Mohon maaf pak, untuk dana yang dicairkan kenapa berbeda ya Pak dalam setiap tahun dari tahun 2020-2022?*”. Lalu Pak Suryono, selaku Kepala Sekolah menjawab “*Jadi pada saat tahun 2020 memang menurun bu, dikarenakan pada saat pandemi covid 19. Yang dimana semua program berefek menurun dalam setiap perbantuan. Jadi dana pemerintah pun ikut menurun juga*”. Jadi pada tabel tersebut memang sudah secara jelas dalam pencairan dana dari pemerintah dan penerimaan dana di seluruh sekolah di Indonesia, yang memang disesuaikan data siswa sesuai syarat dari PIP.

Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

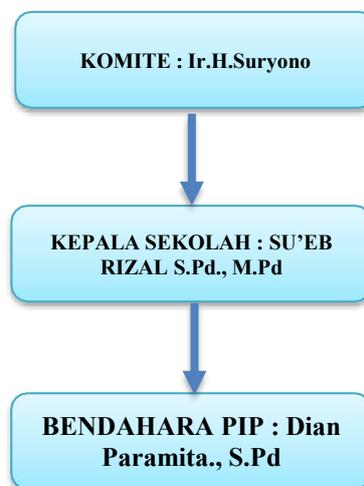
Pada hal ini aspek sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil agen pelaksana. Pemahaman tentang maksud dan tujuan kebijakan sangatlah penting, karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Sedangkan Pengertian Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Jika dilihat dari aspek ini sikap para pelaksana (Disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil pelaksana dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar(PIP) di Indonesia. Pelaksana Kebijakan tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan Program PIP di Indonesia. Dalam kebijakan ini terbukti sikap pelaksana memberikan program ini membantu semua siswa siswi di Indonesia untuk tetap terus melanjutkan Pendidikan meskipun tidak ada dukungan penuh dalam keuangan[13]. Tertera pada Permendikbud No.10 Tahun 2020 yang sudah dijelaskan dari setiap pasal. Tidak hanya sikap pelaksana kebijakan, tetapi sikap pelaksana yang menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo sikap pelaksana yang menjalankan kebijakan PIP tersebut sudah cukup baik. Dimana respon dari para pelaksana menjalankan program ini dengan sangat mendukung Program Indonesia Pintar agar bisa memutus rantai angka putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo sendiri. Dan juga para pelaksana serta penanggung jawab dalam Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian sangat antusias dan menjalin kerjasama dalam mengembangkan serta menerapkan dengan baik. Dengan dibuktikan dari pertanyaan yang di tanyakan pada saat sosialisasi “*Untuk Bapak/Ibu Wali Murid yang mendapat Program Indonesia Pintar, saya selaku Wakil Kepala Sekolah ingin menanyakan apakah jenengan sudah merasa puas dalam penjelasan terkait dana PIP dan dana yang diterima oleh siswa-siswi di SMP Negeri 3 Krian*” . Setelah pertanyaan tersebut dilontarkan, semua respon wali murid menjawab bahwa mereka sudah cukup puas dalam kebijakan atau program yang kita salurkan ini. Dan mereka merasa sangat bahagia dan senang atas kepedulian semua penanggung jawab terkait dana PIP yang diberikan dengan sesuai[14].

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi mengacu pada kecukupan birokrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan elemen penting dari implementasi kebijakan, dan jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik, kebijakan yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik atau mencapai efektivitas yang optimal[15]. Birokrasi merupakan bentuk kelancaran koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana. Dalam Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

Gambar 3



Pada gambar diatas menjelaskan bahwa Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Gambar diatas merupakan Struktur Organisasi terkait Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 3 Krian yang terhubung dengan susunan sesuai dengan posisi atau jabatan. Yang pertama di SMP Negeri 3 Krian masalah penerapan pemberian dana PIP ini di seluruh siswa SMP Negeri 3 Krian yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah dengan Bapak Sueb Rizal, S.Pd., M.Pd yang dibawah naungan Komite Sekolah yang Bernama Bapak Ir. H.Suryono. Kemudian Kepala Sekolah menugaskan pendamping dalam hal dana PIP adalah Bendahara yang di khususkan dalam penyaluran dana PIP yang Bernama Ibu Dian Paramita., S.Pd. Dan untuk lainnya dibantu oleh pegawai sekolah lainnya untuk mendata perkelas terutama bantuan dari wali kelas masing-masing. Dalam hal ini struktur organisasi memiliki manfaat-manfaat lain didalam perusahaan yakni: Dapat membentuk koordinasi untuk karyawan yang berada dalam satu departemen dan memiliki spesialisasi pekerjaan yang sama. Mencapai peningkatan efisiensi pada manajerial yang mana dapat membantu fungsi manajer di dalam perusahaan atau instansi.

IV.Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP 3 Negeri Krian mengalami beberapa masalah diantaranya Dimana pembagian PIP sering terjadi kesalahpahaman antar orang tua murid. Sering tidak adanya bukti penggunaan dana PIP, dan sosialisasi terkait dana PIP kurang jelas bagi para siswa, sehingga sering terjadinya kurangnya syarat atau kriteria penerima dana PIP.

Secara teori Edward III dapat dipaparkan ada 4 indikator yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, antara lain : yang pertama Komunikasi, Keterkaitan komunikasi pada penelitian ini adalah sosialisasi terkait kebijakan Program Indonesia Pintar yang sudah di umumkan pada akhir tahun 2014. Dimana sudah terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Yang kedua Sumber Daya, Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Yang ketiga adalah Disposisi Jika dilihat dari aspek ini sikap para pelaksana (disposisi) merupakan aspek perilaku atau respon yang diambil pelaksana dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Dimana respon dari para

pelaksana yang sangat mendukung Program Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Struktur Birokrasi, dimana struktur ini sudah jelas sesuai dengan peran yang bertanggung jawab terkait dana PIP di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Orang tua saya, salah satu sahabat saya, serta yang paling utama Dosen Pembimbing saya, yang selalu memberikan saran dan kritik untuk mendukung penelitian saya agar menjadi penelitian yang sempurna. Dan tak lupa untuk lokasi penelitian saya di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, beserta Kepala Sekolah dan pegawai yang terkait. Serta terima kasih juga kepada seluruh siswa penerima PIP yang ikut serta membantu penelitian ini. Tanpa mereka saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini dengan Fsebaik mungkin.

REFERENSI

- [1] A. W. d. Solichin, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- [2] C. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- [3] K. P. d. Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar, Jakarta Pusat: BN.2020/No.158, jdih.kemdikbud.go.id : 11 hlm., 2020.
- [4] P. Pusat, Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta Pusat: Perpres, 2015.
- [5] P. Pusat, Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Undang-Undang, 2003.
- [6] P. Pusat, Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Undang-Undang, 2014.
- [7] R. A. Kusnaeni, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI KABUPATEN SEMARANG," *ejournal3*, 2022.
- [8] U. D. K. F. Muhamad Fiqih, "Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar," *FEB UNMUL*, 2022.
- [9] M. d. L. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- [10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: PT Alfabet, 2016.

- [11] N. E. R. d. O. Saryono, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan," *IJEMAR*, 2018.
- [12] G. C. Edward, *Implementing Public Policy*, Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- [13] KEMDIKBUD, "Program Indonesia Pintar," PUSLAPDIK.
- [14] H. Retnaningsih, "PROGRAM INDONESIA PINTAR:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN(STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURDAN KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN)," *Jurnal Masalah Sosial*, 2017.
- [15] Indiahono, Dwiyanto.2009.Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media

